

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI PDI PERJUANGAN UNTUK
MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM
PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024-2029
(Studi Kasus Di Kabupaten Timor Tengah Utara)**

Yosef Kristoforus Taekab, Fridus Bria, Ronaldus Nurak

Email: kristotaekab@unimor.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Timor

Abstract

The representation of women in political life is crucial in influencing the policymaking process that impacts women's lives. The role of women in politics is not only to represent women's interests but also to fight for women's rights and to equalize women's status within the social and political context. This study focuses on the strategies used by the PDI Perjuangan in Timor Tengah Utara Regency to increase the representation of women in legislative elections. The aim of this research is to analyze the political communication strategies of PDI Perjuangan to enhance the representation of women in the legislative elections in Timor Tengah Utara Regency. The research was conducted Timor Tengah Utara Regency, Nusa Tenggara Timur Province. The informants in this study include the leadership of PDI Perjuangan in Timor Tengah Utara Regency and the female legislative members of PDI Perjuangan who succeeded in the 2024-2029 legislative elections. This research is descriptive and qualitative in nature, providing results in the form of primary and secondary data. Primary data was collected through observation and in-depth interviews using interview guidelines as a reference. Secondary data was obtained through literature reviews referring to books, previous research, and other studies. The findings show that the representation of women has increased, and the political communication strategies used by the party, such as political education and training, campaigns and lobbying, strengthening networks, and engaging community leaders, have proven effective in increasing women's involvement."

Keywords: *Political Communication Strategy, Women's Representation, Legislative Elections*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep demokrasi yang ditandai dengan adanya pemilihan umum (Pemilu) yang melibatkan masyarakat untuk memilih secara langsung, seperti pemilihan kepala negara, kepala daerah hingga pemilihan legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berprogres pada masyarakat dalam menentukan pemimpin negara maupun daerah, sehingga memberikan warna baru untuk sistem politik di Indonesia.

Penyelenggaraan Pemilu sebagai

salah satu kegiatan politik yang menjadi syarat bagi kehidupan negara yang demokratis. Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan yang mana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka di parlemen dan pemimpin nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam proses pemilu sebagai indikator kualitas demokrasi (Ubaedillah A., 2015: 96).

Umumnya, yang berperan dalam

Pemilu dan menjadi peserta Pemilu adalah partai politik. Dari sekian banyak partai-partai politik di Indonesia yang ikut dalam Pemilu, yang menarik untuk dikaji adalah PDI Perjuangan. Partai ini lahir sejak tahun 1999, yang diketuai oleh seorang tokoh perempuan, Megawati Soekarnoputri. PDI Perjuangan sebagai sebuah organisasi politik yang berfungsi nyata sebagai sarana rekrutmen politik. Dengan fungsinya ini diharapkan partai dapat menjalankan perekrutan anggota utamanya calon anggota legislatif (caleg) dengan baik. Ketika pemerintah mengharuskan setiap partai politik untuk mengikutsertakan Caleg Perempuan minimal 30%, maka partai juga harus memenuhi kuota tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan PDI Perjuangan di antaranya melalui pengkoordinasian setiap tingkat kepengurusan untuk merekrut sebanyak mungkin caleg perempuan, kaderisasi anggota perempuan, sosialisasi tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik, pengembangan karir politik kader perempuan, merekrut caleg perempuan yang berkualitas dan mendampingi para caleg perempuan dalam melakukan proses kampanye, (Resta Konitiarani, 2017: 45-55).

Perekrutan dalam partai politik sebagai proses yang mana individu atau kelompok-kelompok dilibatkan dalam peran politik aktif dan berkompetisi dalam pemilu. Perekrutan dilakukan partai politik tidak hanya melibatkan kandidat laki-laki tetapi juga melibatkan kandidat perempuan. Keikutsertaan perempuan dalam partai politik merupakan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, aturan kuota minimal 30% bagi perempuan yang duduk di kursi legislatif hingga saat ini belum tercapai. Kuantitas yang belum memenuhi standar ini

berdampak langsung pada kualitas keterlibatan perempuan sebagai pelaku pengambil kebijakan di ranah politik. Permasalahan ini, partai politik memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan representasi perempuan di ranah politik.

Keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mempengaruhi proses perumusan kebijakan yang memiliki dampak terhadap kehidupan perempuan dan peran perempuan dalam politik bukan sekadar mewakili kepentingan perempuan saja, melainkan juga perjuangan dalam rangka memenuhi hak perempuan dan menyetarakan derajat perempuan pada konteks konstruksi sosial dan politik. Ada beberapa hal perlunya representasi perempuan di suatu instansi publik apalagi yang menyangkut dengan pembuatan kebijakan seperti pada ranah legislatif ini. Perempuan diperlukan suaranya atau pendapatnya pada tahap formulasi atau penggodokan kebijakan utamanya yang menyangkut anak-anak dan perempuan itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, pembuatan kebijakan terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kejahatan terhadap anak, jika anggota legislatif perempuan cenderung banyak dalam segi kuantitas maka kebijakan yang diputuskan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk melindungi perempuan dan anak.

Kehadiran perempuan dalam partai politik tentu memberikan efek yang cukup berbeda dalam dunia perpolitikan di tanah air, tetapi dalam menjalankan perannya di politik bahwa kaum perempuan mengalami beberapa hambatan di dalam menjalankan perannya. Secara umum terdapat tiga hambatan yang dialami kaum perempuan dalam menjalankan perannya yaitu hambatan kultur sosial masyarakat,

hambatan psikologis, dan hambatan ekonomi (Yogi Maulana Malik, tanpa tahun: 1-10). Realitas ini secara tidak langsung telah merugikan perempuan, dilihat dari segi demokrasi, jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah total penduduk; dari segi kesetaraan, keterwakilan dari perempuan untuk perempuan, sama halnya dengan tuntutan dari rakyat untuk rakyat; dan dari segi keterwakilan, banyak penelitian empiris yang menunjukkan bila perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka kepentingan mereka tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh.

Dalam UU No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa partai politik harus menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Dalam UU 7 Tahun 2017 Pasal 245 diatur bahwa Daftar Calon Legislatif yang diajukan oleh Partai Politik memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Mestinya dengan dukungan regulasi tersebut lebih banyak perempuan yang berkiprah di parlemen. Namun data menunjukkan bahwa capaian keterwakilan 30% perempuan di parlemen baik di tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota masih belum terpenuhi. Di tingkat MPR RI, terdapat 161 perempuan (23%) dan 550 laki-laki (77%) dari total anggota. Hal serupa terjadi di DPR RI, dengan 119 perempuan (21%) dan 456 laki-laki (79%). Sedangkan di DPD RI, terdapat 42 perempuan (31%) dan 94 laki-laki (69%).

Penelitian ini secara spesifik mengkaji keterwakilan perempuan kader PDI Perjuangan berdasarkan keterpilihan

dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 di DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara. PDI Perjuangan merupakan sebuah partai politik, kehadirannya di parlemen ditunjukkan dengan tidak pernah absen untuk turut aktif dan berpartisipasi dalam setiap Pemilihan Umum Presiden, Kepala Daerah maupun di Lembaga Legislatif. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan perebutan kursi sebanyak 30 kursi, PDI Perjuangan berhasil memperoleh 4 Kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh 5 kursi, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memperoleh 5 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 4 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memperoleh 4 kursi, Partai Demokrat memperoleh 2 kursi, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memperoleh 2 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh 2 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memperoleh 1 kursi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperoleh 1 kursi. (republika.co.id).

Keterwakilan perempuan PDI Perjuangan di kursi legislatif PDI Perjuangan pada periode 2024-2029 tercatat ada 3 politisi perempuan dari total 4 politisi PDI Perjuangan yang lolos, terbanyak dari partai politik yang lain. Keterwakilan perempuan yang lolos pada pemilihan legislatif tahun 2024 ini mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya tahun 2019 yang tidak ada sama sekali, tetapi karena ada salah anggota legislatif dari Partai PDI Perjuangan yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah sehingga ada salah satu kader perempuan yang menggantikan menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW).

Peningkatan keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif di kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024 inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian dengan judul “**Strategi Komunikasi Politik Partai PDI Perjuangan untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024-2029 (Studi Kasus Di Kabupaten Timor Tengah Utara)**”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Dimana peneliti melakukan penelitian untuk mencari jawaban atas fenomena politik yang terjadi di masyarakat.

Dari kedalaman analisisnya, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana dalam melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai subjek yang diteliti. Berdasarkan metode yang digunakan, yakni metode kualitatif, maka informasi didapatkan langsung dari informan-informan yang berkompeten dalam bidangnya. Dari data-data yang diperoleh dari informan akan diolah menjadi sebuah output informasi yang mudah diserap atau dimengerti maknanya oleh masyarakat umum.

Penelitian ini menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dengan informan untuk mendapatkan data primer menurut panduan berupa pedoman wawancara dan penelaahan terhadap dokumen tertulis untuk mendapatkan data sekunder.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Suharsimi Arikunto, 1991: 103).

Dalam menganalisis data, peneliti juga harus menguji keabsahan data agar memperoleh data yang valid. Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini digunakan (5) lima teknik pengecekan dari sembilan teknik yang dikemukakan oleh Moleong.

“Kelima teknik tersebut adalah: 1) Observasi yang dilakukan secara terus-menerus (*persistent observation*), 2) Triangulasi (*triangulation*) sumber data, metode, dan penelitian lain, 3) Pengecekan anggota (*member check*), 4) Diskusi teman sejawat (*reviewing*), dan 5) Pengecekan mengenai ketercukupan referensi (*referential adequacy check*)” (Suharsimi Arikunto, 1991: 175-181).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Komunikasi Politik

A. Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi politik menurut Mc Nair adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan politisi untuk meraih tujuan tertentu. Mc Nair berpendapat bahwa komunikasi politik bukan hanya sebagai komunikasi dari aktor politik kepada pemilih dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga ditujukan kepada para politisi dan pemilih kolomnis surat kabar, serta komunikasi tentang aktor politik dan aktivitas mereka. Sebagaimana terdapat dalam berita, editorial, dan bentuk diskusi politik media lainnya (Brian Mc Nair, 2016: 4). Sedangkan menurut Nimmo, komunikasi politik adalah proses komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi pengetahuan, kepercayaan-

kepercayaan dan tindakan politik terkait dengan persoalan-persoalan politik (Dan nimmo, 1989: 108).

Pengertian komunikasi politik menurut Miriam Budiardjo adalah "Komunikasi politik merupakan fungsi sosialisasi dan budaya politik. Komunikasi yang berjalan baik menjadi prasyarat sosialisasi politik untuk dapat berjalan dengan baik pula sehingga budaya dapat dilangsungkan dengan baik (Sudianto, 2006: 179). Kemudian para ahli komunikasi mendefinisikan bahwa pengertian komunikasi bersumber dari gagasan komunikator yang ingin disampaikan pihak penerima dengan segala daya serta usaha bahkan tipu daya agar pihak penerima mampu untuk memahami serta menerima melalui pesan yang disampaikan (Roni Tabroni, 2012: 4).

Para ilmuwan politik memandang bahwa sebenarnya politik memiliki komunikasi karena banyak definisi komunikasi yang telah terdapat oleh politik terutama dikarenakan Komunikasi itu pada umumnya bertujuan untuk mempengaruhi. Sedangkan politik mencakup pengaruh sebagai konsep khusus dari kekuasaan sebagai sentral kajian politik (Floyd Hunter, 1953: tanpa halaman) Kemudian menurut Harsono Suwardi komunikasi politik adalah setiap bentuk penyampaian pesan baik dalam bentuk lambang-lambang maupun dalam bentuk kata-kata tertulis atau terucap atau dalam sebuah isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu (Leli Aryani, 2010: 16)

Teori dasar dari aplikasi komunikasi politik adalah (Anwar Arifin, 2011: 89) :

1) Teori khalayak kepala batu : Teori ini mengkaji mengenai faktor-faktor yang membuat individu dapat menerima

pesan-pesan komunikasi. Salah satunya adalah lahirnya teori atau model guna dan kepuasan. Kemudian Teori ini dikembangkan oleh Ellul model ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang sangat rasional dan sangatlah aktif dinamis serta selektif terhadap semua pengaruh dari luar dirinya. Khalayak yang selektif itu akan memilih berdasarkan kegunaan dalam memenuhi kepuasan dirinya.

2) Teori empati dan teori homofili: Teori empati dikembangkan oleh Berlo dan Daniel Lerner, kemudian teori homofili diperkenalkan oleh Everett M. Rogers, dan F. Shoemaker. Teori ini merupakan penjabaran dari Paradigma interaksional menurut Daniel Lerner, empati adalah suatu kesanggupan seseorang melihat dirinya sendiri masuk ke dalam situasi orang lain dan kemudian melakukan suatu penyesuaian. kemudian istilah homofili memiliki arti bahwa berkomunikasi dengan orang yang sama artinya derajat orang yang berkomunikasi memiliki kesamaan dalam beberapa hal homofili ini dapat digambarkan sebagai suasana atau kondisi kepribadian dan kondisi fisik antara dua orang yang berinteraksi ketika memiliki kebersamaan usia, bahasa, pengetahuan, kepentingan partai, organisasi, agama, Suku bangsa, serta pakaian. Tetapi dalam hal ini bisa menjadi sulit terjadi interaksi yang intensif jika dua orang yang berinteraksi bersifat heterofili, artinya tidak memiliki kesamaan bahasa, pengetahuan serta kepentingan. Dari adanya empati dan homofili ini akan menciptakan suatu

bentuk keakraban dan intim sehingga komunikasi politik dapat berjalan secara interaksional dalam hal ini Interaksi dapat terjadi antara dua subjek yang selevel dan sederajat. Dalam komunikasi politik yang bersifat dialogis tidak dikembangkan kata aku dan kamu, melainkan yang ditonjolkan adalah kata kita.

- 3) Teori informasi dan teori nonverbal: Teori informasi dan teori nonverbal dikembangkan oleh B. Orbray Fisher, informasi menurutnya adalah sebagai suatu pengelompokan peristiwa-peristiwa dengan fungsi dan tujuan tertentu untuk menghilangkan suatu ketidakpastian. Informasi dapat disebut sebagai konsep yang absolut dan relatif karena informasi diartikan bukan sebagai pesan melainkan jumlah, benda, serta energi. Jika dipandang secara singkat arti dari informasi adalah semua hal yang dapat dipakai dalam bertukar pengalaman jadi informasi dalam komunikasi politik dapat diartikan sebagai sikap politik serta pendapat politik, media politik, kostum partai politik, tamu kader partai politik. Maka dari itu, hakikatnya teori informasi adalah suatu komunikasi politik yang bersifat nonverbal atau tidak terucapkan.

B. Strategi Komunikasi Politik

Strategi komunikasi politik adalah suatu rencana yang di dalamnya terdapat suatu cara, teknik serta hubungan fungsional dari proses komunikasi pada sebuah kegiatan guna untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Dari adanya strategi politik ini diharapkan dapat memberikan dukungan serta aspirasi masyarakat dapat disalurkan. Jika dilihat

dari sudut pandang pemerintah maka Strategi politik ini digunakan untuk membuat serta menerapkan aturan-aturan khusus dalam proses pemilu dengan cara meningkatkan kemampuan serta kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi Dan kepentingannya serta untuk menyalurkan kebijakan-kebijakan tertentu hingga akhirnya menciptakan sebuah komunikasi timbal balik antara suprastruktur dan infrastruktur politik dalam mempersiapkan sebuah Pemilu. Austin dan pink platone berpendapat bahwa strategi dapat dimulai dari merumuskan suatu tujuan. Dalam dunia politik tujuan yang hendak dicapai umumnya adalah untuk mendapatkan kepercayaan rakyat dalam memberikan suara padanya (Pujono. Dkk, 2015: 277). Arti dari strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional mengenai tindakan yang akan dijalankan di mana tujuannya untuk mencapai suatu tujuan politik pada masa depan (Ardin Ode Sairi, 2017). Anwar Arifin berpendapat bahwa terdapat empat strategi komunikasi politik, antara lain:

1) Ketokohan dan kelembagaan

Ketokohan merupakan orang yang memiliki kredibilitas, daya tarik, kekuasaan serta keahlian di mata rakyat. Ketokohan seorang pemimpin politik memiliki pengaruh tersendiri dalam berkomunikasi politik di mata masyarakat. Salah satu karakteristik dari komunikator menurut Aristoteles yang pertama adalah etos hal ini berkaitan dengan kredibilitas sumber. Jadi ketokohan sama dengan etos yaitu keahlian seorang komunikator dalam menyampaikan pesan sehingga berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin politiknya. selanjutnya menurut price dan paisley aspek-aspek yang dibutuhkan dari seorang

Komunikator adalah dapat dipercaya kompetensi atau keahlian, Daya tarik fisik.

2) Menciptakan kebersamaan

Menciptakan kebersamaan ini dapat dilakukan dengan cara memahami masyarakat atau publik menyusun suatu pesan, menetapkan metode dan memilih media. Untuk menciptakan suatu kebersamaan antara politikus dengan masyarakat atau rakyat adalah dengan cara mengenali masyarakat dan menyusun pesan yang homofili. Untuk menciptakan homofili dan melakukan empati melalui persamaan kepentingan maka Komunikator harus mengerti serta memahami daya tangkap dan daya serap masyarakat, baik yang bersifat psikologis ataupun sosiokultural.

3) Membangun konsensus

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam membangun konsensus yaitu seni kompromi atau negosiasi dan kesediaan untuk membuka diri seorang pemimpin politik harus memiliki kemampuan untuk berkompromi dalam melakukan plobian untuk mencapai suatu solusi dengan membangun konsensus Selain itu pemimpin politik juga harus siap untuk membuka diri sesuai dengan konsep yang ada pada tiap-tiap politikus yang berbeda pendapatnya (Anwar Arifin, 2011: 235)

4) Memilah serta memilih media

Dalam komunikasi politik perlu adanya memilah serta memilih media dengan cermat, di mana Tujuannya adalah untuk menyesuaikan Suatu kondisi dan situasi masyarakat. Dengan tetap memperhatikan sistem komunikasi politik di suatu negara ataupun bangsa.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, dapat dilihat bahwa perkembangan keterwakilan perempuan

dalam lembaga legislatif di Kabupaten Timor Tengah Utara mengarah pada peningkatan jumlah anggota DPRD perempuan. Ditambah dengan adanya instruksi/pencanangan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah yang telah dilegitimasi melalui undang-undang partai politik maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Peningkatan ini tentu membutuhkan strategi yang dilakukan oleh partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif sehingga kemudian bisa terpilih. Oleh karena itu maka penulis akan mencoba menguraikan strategi-strategi yang dilakukan oleh Partai PDI Perjuangan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan:

Pendidikan dan Pelatihan Politik

Pendidikan politik memiliki peran penting dalam mempersiapkan kader partai politik untuk berkompetisi dalam pemilihan anggota legislatif. Pendidikan politik akan memberikan pengetahuan kepada para kader partai politik untuk dapat memahami dan menyusun strategi untuk menarik simpati para pemilih di daerah pemilihan (*constituency*). Peningkatan pemahaman politik baik nasional dan regional penting untuk dimiliki oleh setiap kader partai politik. Partai politik di Indonesia masih terkendala dalam mempersiapkan dan melakukan pendidikan politik bagi kader. Konsekuensinya adalah kader tidak memahami strategi pemenangan dan lebih melakukan aktifitas pragmatis untuk mendapatkan suara pemilih (Vina Salviana Darvina Soedarwo, 2015: 1). Pendidikan politik menjadi strategi partai politik untuk

meningkatkan loyalitas kader terhadap partai politik (Hariyanti, 2018: 1). Pendidikan politik secara langsung dapat mempengaruhi para kader untuk memiliki sikap yang kuat untuk dapat memenangkan partai politik dalam pemilihan umum baik di tingkat nasional dan daerah (Ahmad & Suryadi, 2020: 1). Selain itu pendidikan politik juga diharapkan dapat membangun sikap tanggungjawab kader partai untuk membesarkan partai dan menjaga integritas negara dan kewarganegaraan (Hijran, 2018: 1).

Pendidikan politik menjadi instrumen penting bagi partai politik berperan dalam meningkatkan kuantitas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kaderisasi yang dilakukan melalui pendidikan politik memungkinkan partai politik untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam proses rekrutmen dan pencalonan kader perempuan (Dickson Omondi, 2016; Nurdin, 2021: 1). Dengan demikian, pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilu. Salah satu strategi yang diaplikasikan oleh kader partai politik perempuan adalah dengan menguatkan kapasitas komunikasi dengan konstituen (Jandevi, 2019: 68).

Partai Politik sering mengadakan program pelatihan yang dirancang untuk membekali perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk terlibat dalam politik. Pelatihan ini mencakup pengembangan kepemimpinan, keterampilan berbicara di depan umum, pemahaman tentang sistem politik, dan strategi kampanye. Partai PDI Perjuangan kabupaten Timor Tengah Utara melalui salah satu kader perempuannya mengatakan bahwa pelatihan kepemimpinan ini sangat berpengaruh dalam proses pemilihan legislatif. Selain itu, partai politik lainnya

terutama di PDIP juga menjurus strateginya melalui Ikatan Perempuan PDI Perjuangan menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa jalur seperti Yayasan Bife Kuan (YABIKU), Yayasan Tapen Pah Bikomi yang secara terus-menerus memperjuangkan hak-hak perempuan untuk para kader perempuan dengan berbagai pendidikan dan sekolah-sekolah partai baik tentang administrasi kesekretariatan, pengelolaan administrasi keuangan serta pendidikan pancasila, dan politik.

Kampanye dan Lobi

Kampanye merupakan upaya sistematis guna mempengaruhi khalayak terutama calon pemilih yang bertujuan agar calon pemilih memberikan suaranya kepada kandidat yang sedang berkompetisi dalam suatu pemilihan (Pawito, 2009: 210). Kampanye merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan komunikasi politik. Kampanye politik dilakukan sehingga apa yang menjadi tujuan partai dapat tercapai. Kampanye politik ini dilakukan dengan menggunakan instrumen komunikasi politik yang tepat (Wahid, 2016:163). Menurut Dan Nimmo kampanye adalah upaya untuk mempropagandakan pemberi suara yang potensial. Rogers dan Storey menjelaskan bahwa kampanye adalah tahapan kegiatan komunikasi yang sudah diatur sedemikian rupa dengan tujuan menciptakan dampak tertentu pada sejumlah besar masyarakat (Wahid, 2016:164).

Lobi Politik, istilah lobi mengacu pada tempat para tamu menunggu untuk berbincang-bincang di hotel. Dalam lobi politik pengaruh dari pribadi seorang politikus sangat berpengaruh seperti kompetensinya, penguasaan masalah dan karisma. Lobi politik adalah gelanggang

terpenting bagi pembicaraan para politikus atau kader tentang kekuasaan, pengaruh, otoritas, konflik dan konsensus.

Selain pelatihan kader, PDIP juga melakukan kampanye, kader perempuan juga didorong partai politik untuk memperkenalkan kebijakan afirmatif seperti kuota gender. Mereka juga melakukan lobi kepada pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa undang-undang dan regulasi mendukung partisipasi perempuan dalam politik. Sehingga kader perempuan dalam proses kampanye mempunyai bekal yang mumpuni untuk bisa bersaing dengan kader-kader partai dari kaum laki-laki.

Dalam sesi wawancara yang dilakukan dengan ketua DPC PDIP Kabupaten Timor Tengah Utara Karolus Boromeus Sonbay pada tanggal 02 Oktober 2024 mengatakan bahwa

“peningkatan keterwakilan perempuan ini seperti yang dilihat paling banyak itu di Partai PDIP karna kita secara nasional sudah banyak perempuan yang terlibat dalam partai politik, bahkan ketua umum kami itu seorang perempuan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kampanye politik dari partai yang secara terus menerus menyuarakan tentang kesetaraan perempuan terutama dalam memperjuangkan kuota afirmasi 30% pemerintah yang masih jauh dari targetnya. Kedepannya kami dari partai PDIP akan semakin banyak menarik kader-kader perempuan untuk terlibat aktif dalam partai politik karna kami percaya bahwa jika kita ingin agar kebijakan itu bisa menyentuh atau sarannya bisa menjawab kebutuhan perempuan maka diperlukannya sosok perempuan untuk terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan tersebut salah

satunya yaitu terlibat dalam dunia politik melalui partai politik”.

Penguatan Jaringan

Jaringan politik merupakan hubungan yang dibentuk oleh seorang kandidat sebelum pelaksanaan kontestasi Politik. Jaringan politik terbentuk dari interaksi yang dilakukan oleh aktor dengan aktor yang lain. Jaringan terbentuk dari kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau aktor lain kepada kandidat. Menurut Robert. D. Putnam jaringan politik merupakan bagian dari modal sosial. Di dalam modal sosial terdapat 3 komponen yaitu kepercayaan, norma, dan jaringan. Jaringan politik akan terlaksana apabila adanya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap tindakan atau janji yang diberikan oleh pasangan calon. Jaringan politik berpengaruh besar terhadap kemenangan pasangan calon dalam kontestasi Pilkada atau Pemilu.

Kader perempuan sering kali membangun jaringan dengan berbagai kelompok lain, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, dan partai politik. Dengan bekerja sama, mereka dapat memperkuat upaya mereka dalam mempromosikan keterwakilan perempuan. Untuk menguatkan jaringan dan akar rumput kader perempuan dituntut untuk bisa bekerja sama dengan semua elemen masyarakat. Inilah yang dilakukan PDIP Timor Tengah Utara untuk menguatkan jaringan sebagai salah strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif.

“Di TTU banyak perempuan tidak mau terlibat karna budaya yang masih mengakar yaitu perempuan seringkali disibukkan dengan pekerjaan rumah sehingga untuk terjun dalam dunia politik

itu menjadi sangat susah karena kurangnya relasi. Oleh karena itu di partai ini kami berusaha keras untuk membuat perempuan itu keluar dari zona nyaman untuk bebas berelasi dengan siapapun termasuk masyarakat sipil, masyarakat adat, melalui keterlibatan mereka melalui organisasi-organisasi seperti Yabiku, Beta Timor dan lain-lain untuk bisa memperluas relasi dengan masyarakat sehingga bisa lebih memahami kebutuhan-kebutuhan mendasar di masyarakat terlebih kebutuhan kaum perempuan” dilansir dari wawancara dengan Sekertaris DPC PDIP TTU Habel Manu Nufa pada tanggal 14 Oktober 2024.

Melalui Pendekatan Tokoh Masyarakat

Strategi partai politik PDIP Timor Tengah Utara dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan dilakukan dengan cara menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh beberapa anggota dewan perempuan terkait strategi yang digunakan salah satunya yang paling utama ialah membangun interaksi terhadap masyarakat secara luas terutama membangun interaksi terhadap tokoh masyarakat. Sehingga interaksi yang dibangun mampu menciptakan hubungan baik dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyumbangkan aspirasi-aspirasinya kepada masyarakat secara lebih luas. Karena untuk mengambil hati masyarakat maka strategi terbaiknya ialah membangun citra baik kepada tokoh masyarakat terlebih dahulu. Sebagian besar masyarakat Indonesia perspektifnya terhadap sesuatu dipengaruhi juga oleh tokoh masyarakat. Namun tidak semua kader perempuan dalam partai politik mampu membangun citra yang baik kepada

tokoh masyarakat sehingga hal ini menjadi salah satu sumber permasalahan perempuan dalam menduduki suatu jabatan di dunia politik. Ungkapan tersebut menggambarkan pernyataan dari para kaum feminisme liberal bahwa sumber permasalahan perempuan selama ini adalah karena perempuannya itu sendiri yang merasa belum mampu untuk maju memberikan kontribusi dan citra diri yang positif kepada masyarakat. Solusi yang harus dilakukan yaitu melalui pembekalan kaum perempuan dengan pendidikan dan juga pendapatan. Selain itu, perlunya bergerak secara massif, pergerakan ini jangan hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil, karena akan menghancurkan komunalitas. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya *committee organizer* untuk mengorganisasi masa. Upaya ini juga bisa digerakkan melalui tokoh masyarakat yang disegani untuk mengumpulkan masa, karena pada kenyataan sosial manusia pada dasarnya hidup berkelompok didalam masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh dilakukan dengan Ketua Tim Penjaringan Partai PDIP TTU Herrybertus Radja pada tanggal 08 Oktober 2024 mengatakan bahwa *“Seperti yang kita lihat di TTU perempuan itu masih dianggap sebagai kaum yang tugasnya hanya mengurus rumah tangga oleh sebagian besar masyarakat. Disinilah partai kami mendorong perempuan untuk berusaha meyakinkan masyarakat untuk bisa lebih bebas berinteraksi dan memperkuat citra mereka melalui tokoh-tokoh adat yang disegani masyarakat sehingga kemudian bisa medapat kepercayaan penuh dari masyarakat”*

KESIMPULAN

Pemilihan legislatif tahun 2024 telah memunculkan suatu fenomena baru di kabupaten Timor Tengah Utara. Perwakilan perempuan dari PDI P yang seringkali tidak ada, pada tahun ini meningkat menjadi 3 orang dari 4 orang yang terpilih. Berdasarkan dari hasil penelitian, wawancara dan pengolahan data maka dapat disimpulkan bahwa Ini tidak terlepas dari beberapa strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik diantaranya; pendidikan dan pelatihan politik, kampanye dan lobi, penguatan jaringan, serta pendekatan tokoh masyarakat.

Oleh karena itu pencapaian ini harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi sehingga bisa memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah yang telah dilegitimasi melalui undang-undang partai politik maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

REFERENSI

- Abdillah Ubaedillah, 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Arifin, Anwar. 2011. *"Komunikasi Politik (Filsafat Paradigma Teori Tujuan Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia)"*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aryani, Leli. (2010). *Komunikasi Politik Politisi Dan Pencitraan Di Panggung Politik*. Bandung: Wijaya Padjajaran.
- Hunter, Floyd.1953.*Community Power Structure*. Universty of North Carolina Press
- Konitiarani, Resta, dan Ahmad Zuber. (2017) *"Upaya PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dalam Memenuhi Kuota Calon Legislatif Perempuan."* Jurnal Sosiologi DILEMA.
- McNair, Brian. 2016. *Pengantar Komunikasi Politik*. Nusa Media. Bandung
- Nimmo.D. 1989. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media (Edisi Terjemahan oleh Tjan Sujarman)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pujono, dkk. Strategi Komunikasi Politik Calon Legislatif Partai Golkar dalam Memenangkan Pemilihan Umum 2014 di Kabupaten Sragen, 2015.
- Tabroni, Roni. 2012. *Komunikasi Politik pada Era Multimedia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.